

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN**

Pada bab IV ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian terkait efektivitas peran SFCG dalam menangani kejahatan kemanusiaan terhadap perempuan dan anak-anak korban konflik Poso tahun 2009-2016. Penulis juga akan memberikan saran bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam membantu mewujudkan perdamaian dan resolusi konflik khususnya di Indonesia.

#### **4.1. Kesimpulan**

Konflik yang marak terjadi di era modern dengan menimbulkan korban dari kalangan sipil yang lebih banyak daripada militer/kombatan menjadi latar belakang penelitian ini. Terlebih korban-korban tersebut sebagian besar adalah kaum perempuan dan anak-anak yang seharusnya memiliki perlindungan yang diutamakan dalam sebuah konflik atau peperangan. Sebanyak 80% atau setara empat juta jiwa korban konflik dari kalangan sipil yang merupakan perempuan dan anak-anak pada dekade 1990-an inilah yang menyebabkan *physical healing* bagi mereka lebih beragam dan melalui jalan yang lebih panjang daripada laki-laki korban konflik pada umumnya<sup>1</sup>. Fenomena tersebut kemudian mendorong pemerintah maupun organisasi non-pemerintah baik lokal, nasional maupun internasional untuk melaksanakan

---

<sup>1</sup> (Indonesian Irib, 2014)

tugasnya sebagai penegak perdamaian dengan alasan perlindungan hak asasi manusia.

*Search for Common Ground* atau SFCG adalah organisasi non-pemerintah internasional yang diteliti oleh Penulis teruntuk melihat sejauh mana efektivitas perannya dalam mewujudkan perdamaian di Poso bagi perempuan dan anak-anak korban konflik tahun 1998-2001. Setelah berjalannya penelitian ini, Penulis menyimpulkan bahwa peran SFCG dinilai efektif dalam membangun perdamaian di Poso bagi perempuan dan anak-anak korban konflik melalui lima program internal dan lima program atas kerja sama eksternal dengan berbagai pihak. Lima program internal tersebut antara lain Komik Perjalanan Mencari Sahabat, *Leading Fellowship Program*, *Peace Leaders Camp: Collaboration in Diversity*, *Student Initiatives on Peacebuilding*, dan Festival Perdamaian: *Peace 360*. Sedangkan lima program yang terwujud atas kerja sama eksternal antara lain dengan Menkopolhukam RI, Kemenag RI, Perempuan, Lembaga Adat/Agama, dan Lembaga Pendidikan. Kesepuluh program tersebut dinilai efektif dalam menangani kejahatan terhadap perempuan dan anak-anak korban konflik Poso 1998-2001 berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan yang bersumber dari pemikiran Jane Nelson.

**Tabel 4.1**

**Total Prosentase Efektivitas Peran Internal SFCG berdasar Indikator Nelson**

Indikator		Program					Total
		Komik Perjalanan Mencari Sahabat	Leading Fellowship Program	Peace Leaders Camp: Collaboration in Diversity	Student Initiatives on Peacebuilding	Festival Perdamaian Peace 361	
Advokasi, analisis, dan peningkatan kesadaran masyarakat	Advokasi	1	1	1	1	1	
	Analisis	1	0	0	0	0	
	Kesadaran	1	1	1	1	1	
Perantaraan		0	0	0	0	0	
Resolusi konflik		1	1	1	1	1	
Peningkatan SDM Poso		1	1	1	1	1	
Pelayanan Masyarakat		1	1	1	1	0	
Evaluasi dan Pengawasan	Evaluasi	1	1	1	1	0	
	Pengawasan	0	0	1	0	0	
<b>Total Nilai</b>		7	6	7	6	4	
<b>Total Baku Mutu</b>		9	9	9	9	9	45
<b>Prosentase Total (%)</b>							67%
<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Indikator yang tercapai dianggap bernilai 1.</li> <li>-Indikator yang tidak tercapai dianggap bernilai 0.</li> <li>-Prosentase total didapat dari (Total Nilai/Total Baku Mutu) x 100%.</li> </ul>							

**Tabel 4.2**

**Total Prosentase Efektivitas Peran Eksternal SFCG berdasar Indikator Nelson**

Indikator		Program					Total
		Kemenkopolhukam RI	Kemenag RI	Perempuan	Lembaga Adat/ Agama	Lembaga Pendidikan	
Advokasi, analisis, dan peningkatan kesadaran masyarakat	Advokasi	1	1	1	1	1	
	Analisis	0	0	0	0	0	
	Kesadaran	0	1	1	1	1	
Perantaraan		0	0	0	0	0	
Resolusi konflik		1	1	1	1	1	
Peningkatan SDM Poso		0	1	1	1	1	

Indikator	Program					Total	
	Kemendikpolhukam RI	Kemenag RI	Perempuan	Lembaga Adat/ Agama	Lembaga Pendidikan		
Pelayanan Masyarakat	0	1	1	1	1		
Evaluasi dan Pengawasan	Evaluasi	0	1	1	1		
	Pengawasan	0	0	1	0		1
<b>Total Nilai</b>		2	6	7	6	7	28
<b>Total Baku Mutu</b>		9	9	9	9	9	45
<b>Prosentase Total (%)</b>							62%
Catatan : -Indikator yang tercapai dianggap bernilai 1. -Indikator yang tidak tercapai dianggap bernilai 0. -Prosentase total didapat dari $(\text{Toal Nilai}/\text{Total Baku Mutu}) \times 100\%$ .							

Sumber: Pengolahan data menggunakan rumus *Mean* berdasarkan indikator Nelson

Setelah melihat enam indikator yang dikemukakan oleh Nelson pada Bab I, SFCG dinyatakan mampu melaksanakan 67% efektivitasnya dari kelima program internal dan 62% dari program eksternal atas kerja sama dengan lembaga lain yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2009-2016 terkait upaya resolusi konflik bagi perempuan dan anak-anak korban konflik Poso.

Efektivitas peran SFCG di atas dalam membangun kembali perdamaian di Poso sudah sesuai dengan teori Organisasi Internasional yang oleh kaum Neoliberal Institusionalis lebih dikenal sebagai Institusi Internasional. Teori ini meyakini bahwa dibutuhkan adanya entitas lain untuk menjaga hubungan internasional agar tetap stabil pada polanya ditengah anarkisme yang selalu berkembang dan bisa menyebabkan perpecahan antar kepentingan. Efektivitas yang dicapai SFCG juga membuktikan bahwa organisasi non-pemerintah ini juga mampu memberikan dampak

nyata dalam tatanan hubungan internasional atas isu-isu *low politics* untuk menangani kejahatan transnasional terutama di bidang penegakan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Efektivitas peran SFCG juga tidak terlepas dari teori Resolusi Konflik Galtung khususnya *Peacebuilding* yang sesuai dengan tujuan utama organisasi SFCG, yaitu untuk melaksanakan tugas resolusi konflik. Menurut Galtung, *Peacebuilding* merupakan proses dalam membangun perdamaian yang dilakukan secara struktural maupun kultural melalui akar suatu konflik. Menurut SFCG, konflik Poso terjadi akibat kepentingan politik yang disampaikan melalui konflik agama karena peristiwa ketidaksengajaan antar pemuda pada akhir Desember 1998. Seiring berkembangnya konflik, agama mayoritas di Poso yang memiliki hubungan sangat erat kemudian terpecah dan berposisi tanpa sebab konflik yang jelas. Atas inisiatif SFCG, kedua kubu yang berseteru antara Islam dan Kristen disatukan kembali melalui berbagai program dan kegiatan yang syarat akan kehidupan masyarakat Poso itu sendiri yang aman dan damai sebelum konflik pada puncaknya.

Dalam artian lain, *Peacebuilding* adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian abadi. *Peacebuilding* di Poso sendiri terlihat dari aktivitas sosial masyarakat yang membaik di berbagai kesempatan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah seperti festival perdamaian pasir putih Poso oleh SFCG dan Kongres Perempuan Mosintuwu 2014 oleh Mosintuwu Institut yang bekerjasama juga dengan

SFCG dan Komnas Perempuan serta organisasi sosial lainnya. Rekonstruksi politik di Poso juga kemudian membaik dengan adanya Undang-Undang Desa pada 2014 yang mendorong perempuan Poso untuk lebih maju, salah satunya seorang kepala desa yang menggunakan dana bantuan pemerintah untuk membangun Taman Kanak-kanan (TK) dan sumur penampungan air agar perdamaian bagi semua lapisan masyarakat di Poso dapat terwujud melalui hal-hal kecil namun sangat berarti. Jalannya perekonomian masyarakat juga merupakan wujud *Peacebuilding* di Poso dimana masyarakat pesisir yang mayoritas beragama Kristen banyak menjual ikan untuk orang-orang gunung yang mayoritas beragama Islam.

Kejahatan kemanusiaan yang terjadi akibat konflik Poso tahun 1998-2001 sudah cukup membuktikan adanya pelanggaran HAM fundamental terutama bagi perempuan dan anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan secara utuh sesuai Pasal 77 Konvensi Jenewa 1949 yang disusun secara rinci seperti ayat 1 dimana anak-anak harus tetap dihormati setara manusia dewasa lainnya, dan pasal 2 tentang bantuan khusus bagi perempuan dan anak-anak yang bersifat urgensi. Dari sebuah data oleh KPKP-ST menunjukkan bahwa terdapat 9% kekerasan yang menimpa anak-anak, 10% kekerasan yang menimpa perempuan, 15% pelecehan seksual yang menimpa perempuan dan anak-anak yang dilakukan oleh militer, dan 66% kekerasan dilakukan oleh kombatan atau lawan. Hal ini berarti pelecehan seksual massal yang dilakukan pada 20 Mei 2000 di Desa Sintuwulemba, kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak termasuk lontaran kata-kata kotor dan

rabaan di area-area seksual pada anak oleh kombatan atau militer yang tidak bertanggungjawab, hingga kehamilan di luar nikah dan aborsi paksa yang menyebabkan hadirnya Kampung Janda di tengah kehidupan masyarakat Poso adalah bagian dari pelanggaran HAM pada perempuan dan anak-anak korban konflik yang dikemukakan oleh KPKP-ST di atas.

## **4.2. Saran**

Sesuai dengan temuan kesimpulan di atas maka saran yang mungkin bisa dijadikan sebagai alternatif bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait dengan resolusi konflik di Indonesia antara lain:

### **4.2.1. Pemerintah Indonesia**

- a. Pemerintah Indonesia untuk lebih memperketat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam melindungi warga negaranya terutama perempuan dan anak-anak di sebuah konflik.
- b. Pemerintah harus bertindak tegas dalam memberikan sanksi bagi pelanggaran HAM yang terjadi di ranah konflik termasuk kegiatan provokasi yang dilakukan baik dari kalangan sipil, kombatan, maupun aparaturnegara. Penerapan sanksi tegas dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran HAM dan masyarakat sekitar agar tidak mengulangi kesalahan serupa.

#### **4.2.2. Search for Common Ground (SFCG)**

- a. SFCG dalam membuat program atau kegiatan agar memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam jangka lebih panjang seperti melalui *monitoring* dan sejenisnya agar perdamaian tetap berlangsung abadi. Hal ini karena sebuah organisasi non-pemerintah seperti ini bekerja berdasarkan *project*, dimana apabila *project* tersebut usai maka fokus organisasi akan dipusatkan ke *project* selanjutnya dan meninggalkan *project* yang lalu.
- b. SFCG dalam membuat program atau kegiatan selanjutnya harus mempertimbangkan dampak yang dihasilkan dari program tersebut, baik dampak positif maupun negatif seperti ganti rugi transportasi maupun akomodasi yang kemudian meimbulkan sifat ketergantungan bagi masyarakat sekitar dan membanding-bandingkan besaran rupiah yang mereka dapat dari setiap kegiatan. Hal ini akan menyusahakan lembaga lain dalam menjalankan tugas/penelitian serupa dengan dana/biaya yang lebih rendah dari kegiatan SFCG.